

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

Untuk melakukan suatu sistem perencanaan yang strategis, suatu organisasi perlu melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di daerah dengan metode analisis *SWOT*, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan adalah selisih antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan suatu gambaran tentang hasil yang telah dicapai dan tentunya hal ini juga masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang menjadi penyebab/menghambat pencapaian kinerja.

Dibawah ini akan diuraikan beberapa permasalahan yang muncul disetiap bidang :

3.1.1. Bidang Data dan Informasi :

1. Luasnya cakupan wilayah pendataan keluarga serta sulitnya akses menuju lokasi merupakan kendala yang sering dihadapi oleh para pengumpul data di lapangan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses pengolahan data.
3. Kurangnya SDM yang berkualitas.

3.1.2. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi :

1. Rendahnya usia kawin pertama.

2. Rendahnya pengguna MKJP.
3. Tidak ditunjang oleh pengadaan Alkon melalui APBD.
4. Keterbatasan jumlah penyuluh KB sehingga kurang sosialisasi oleh PKB.

3.1.3. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi :

1. Masih kurang tenaga lapangan.
2. Belum maksimalnya melakukan advokasi pembinaan dan KIE lini lapangan.
3. Perlu pembinaan maksimal.
4. Masih perlu pembentukan dan pembinaan PIK R /M.

3.1.4. Bidang Pengendalian Penduduk

1. LPP Kabupaten Majene masih cukup tinggi, di atas angka nasional dengan persebaran penduduk yang timpang.
2. Angka kelahiran relatif masih tinggi.
3. AHH masih relatif rendah.
4. Masih belum sinerginya antara kebijakan kuantitas, kualitas, dan mobilitas.
5. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan lainnya yang kurang mendukung kebijakan kuantitas penduduk.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Majene harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga arah dan tujuan dari pembangunan itu dapat terwujud dan

terlaksana sebagaimana mestinya dan perlu ditetapkan melalui suatu Visi sehingga kedepan tujuan pembangunan oleh pemerintah dapat terwujud, adapun Visi Kabupaten Majene adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA DI KABUPATEN MAJENE DALAM TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DEMOKRATIS DALAM KEHIDUPAN AGAMIS DAN BERBUDAYA”

Untuk melaksanakan suatu Visi pemerintah daerah, perlu ditetapkan dengan suatu misi yang sangat memungkinkan untuk mencapai suatu program pembangunan oleh pemerintah yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM masyarakat dan aparatur pemerintahan.
2. Peningkatan akselerasi pembangunan bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan.
3. Pengembangan dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber motivasi dan inovasi dalam pembangunan.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta sarana-prasarana daerah.
5. Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan.
6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
8. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.
9. Peningkatan peran lembaga keuangan daerah untuk mendorong ekonomi kerakyatan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Majene tahun 2012-2016, maka beberapa program dari Visi dan Misi tersebut memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Program keluarga berencana.
6. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan kelompok UPPKS.
7. Program pengembangan model BKB-Posyandu-PAUD.
8. Program keluarga sejahtera
9. Program pengendalian penduduk.

Sebagai salah satu SKPD, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene berusaha turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Majene sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian dalam pelaksanaannya selama ini belum didukung dengan adanya anggaran dan sarana prasarana yang memadai, hal ini tampak dalam anggaran yang dikelola selama ini. Dengan modal semangat dan kerjasama selama ini pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan bersama, meskipun dengan hasil yang belum optimal.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Untuk meningkatkan maksud, tujuan dan sasaran dari rencana strategis pembangunan organisasi dan masyarakat maka perlu didukung dengan rencana yang matang, efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat

terlaksana secara berkesinambungan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu maka Pemerintah Daerah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene selaku pengemban amanat masyarakat harus mempersiapkan secara efektif dan efisien sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud, salah satunya dengan rencana strategis yang dipersiapkan saat ini.

Adapun program prioritas nasional pembangunan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk menunjang kegiatan program Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, adalah sebagai berikut :

1. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
2. Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN.
3. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya BKKBN.
4. Program Sarana dan Prasarana Aparatur BKKBN.
5. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam dua tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rencana program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene adalah salah satu instansi pemerintah yang letak lokasinya berada pada Jalan Poros Majene-Mamuju.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tentunya tidak terlepas dari ruang lingkup dari program dan kegiatan yang ada. Program dan kegiatan tersebut sangat berkaitan dengan adanya pemekaran wilayah desa dan kelurahan. Hal ini memberikan ruang gerak kepada masyarakat dalam memaksimalkan pelayanan secara berkesinambungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting / keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan

menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Hal yang lebih dipenting juga perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah hubungannya dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Tujuannya agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas akan diidentifikasi ke dalam isu strategis dalam Renstra SKPD tahun 2014 – 2015 sebagai berikut :

TABEL 3.5.1. IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS TAHUN 2014-2015

| NO | BIDANG | PERMASALAHAN | ISU |
|----|---|---|---|
| 1. | Data dan Informasi | <ul style="list-style-type: none"> - Luasnya cakupan wilayah pendataan keluarga serta sulitnya akses menuju lokasi merupakan kendala sarana dan prasarana oleh para pengumpul data di lapangan. - Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses pengolahan data. - Kurangnya SDM yang berkualitas. | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu, terutama pada penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk, survey kependudukan, dan data sektoral bidang KKB. |
| 2. | Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya usia kawin pertama. - Rendahnya pengguna MKJP. - Tidak ditunjang oleh pengadaan Alkon melalui APBD - Keterbatasan jumlah penyuluh KB sehingga kurangnya sosialisasi oleh PKB. | <ul style="list-style-type: none"> - TFR rendah. - DO tinggi. - Rendah Prevalensi Alkon. - Pelayanan di Fasyankes Non MKJP. |
| 3. | Keluarga | <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurang tenaga lapangan. | <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan tenaga |

| | | | |
|----|------------------------|--|--|
| | Sejahtera dan Advokasi | <ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya melakukan advokasi pembinaan dan KIE di lini lapangan. - Kurangnya pembentukan dan pembinaan PIK R / M. | <p>lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan pembinaan dan KIE di lini lapangan. - Penambahan kelompok PIK R / M serta pembinaan. |
| 4. | Pengendalian Penduduk | <ul style="list-style-type: none"> - LPP Kabupaten Majene masih cukup tinggi, di atas angka nasional dengan persebaran penduduk yang timpang. - Angka kelahiran relatif masih tinggi. - AHH masih relatif rendah. - Masih belum sinerginya antara kebijakan kuantitas, kualitas, dan mobilitas. - Masih terdapatnya kebijakan pembangunan lainnya yang kurang mendukung kebijakan kuantitas penduduk. | <ul style="list-style-type: none"> - Penyerasian dan pemaduan kebijakan kependudukan. - Peningkatan kemitraan strategis dengan stakeholders, mitra kerja, dan penggerakan partisipasi aktif masyarakat. - Peningkatan pemahaman remaja mengenai penyiapan kehidupan keluarga dan kesehatan reproduksi. - Peningkatan kapasitas SDM berbasis kompetensi serta penelitian dan pengembangan program kependudukan. - Peningkatan kualitas data mikro dan informasi. |

Berdasarkan permasalahan per bidang di atas, maka ditetapkan isu-isu strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene, yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu, terutama pada penyediaan data

kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk, survey kependudukan, dan data sektoral bidang KKB.

2. TFR rendah.
3. DO tinggi.
4. Rendah prevalensi alkon.
5. Pelayanan di Fasyankese non MKJP.
6. Penambahan tenaga lapangan.
7. Memaksimalkan pembinaan dan KIE di lini lapangan.
8. Penambahan kelompok PIK R/M serta pembinaan.
9. Penyerasian dan pepaduan kebijakan kependudukan.
10. Peningkatan kemitraan strategis dengan stakeholders, mitra kerja, penggerakan partisipasi aktif masyarakat.
11. Peningkatan pemahaman remaja mengenai penyiapan kehidupan keluarga dan kesehatan reproduksi.
12. Peningkatan kapasitas SDM berbasis kompetensi serta penelitian dan pengembangan program kependudukan.
13. Peningkatan kualitas data mikro dan informasi.

